

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademik Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*

MAHENDRA ANDRIAWAN S

NIM: 01870614285



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2021

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


NAMA : MAHENDRA ANDRIAWAN S
 NIM : 01870614285
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TALUK KUANTAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING



AFRIZAL, S.Sos M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

Wakil Dekan I
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Ketua Jurusan
 D3 Administrasi Perpajakan


Dr. Jhon Afrizal, S. Hi. MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

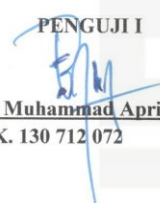
NAMA : MAHENDRA ANDRIAWAN S
NIM : 01870614285
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA
PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DIKANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMAT) TELUK
KUANTAN DIKABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

DISETUJI OLEH :
KETUA PENGUJI



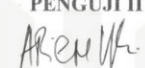
Dr. Hariza Hasyim SE,M,SI
NIP.19760910200901 2 003

PENGUJI I



Dr. Muhammad April,SH,M,HUM
NIK. 130 712 072

PENGUJI II



Ari Nurwahidah.SE,MM
NIP. 19780105200710 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHENDRA ANDRIAWAN .S
 NIM : 01870614285
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan , 12 oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 administrasi perpajakan
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
Tata Cara Penghapusan Benda piutang pajak kendaraan Bermotor
Di kantor sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 oktober 2021
 at pernyataan

 Mahendra andriawan .s
 NIM : 01870614285

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DI KABUPATEN**

KUANTAN SINGINGI

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung dari bulan september sampai bulan oktober. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian saya pada kantor SAMSAT ini, tingkat kerja kantor SAMSAT ini lumayan baik dalam melayani masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi mengenai kapan di mulai dan berakhir nya waktu untuk pelaksanaan penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor tersebut. Untuk melakukan penghapusan denda piutang tersebut masyarakat harus menyiapkan berkas – berkas yang di di perlukan sesuai syarat – syarat dan ketentuan untuk penghapusan denda piutang kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

This research was conducted at the SAMSAT office in Kuantan Bay, Kuantan Singingi Regency, which took place from September to October. The purpose of this study was to find out how the procedure for eliminating motor vehicle tax receivables fines at the Manunggal One Roof Administration System (SAMSAT) office, Taluk Kuantan, Kuantan Singingi Regency. in the payment of motor vehicle taxes, but many people do not know information about when the start and end of the time for the implementation of the abolition of the motor vehicle tax receivable fines. To eliminate the fines for receivables, the community must prepare the files that are needed according to the terms and conditions for the elimination of fines for motor vehicle receivables.

Keywords: Elimination of Motor Vehicle Tax Receivable Fines



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalāmu’alaikum Warah̄matullāh Wabarakātuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Tata Cara Penghapusan Denda piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten kuantan Singingi”**. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawāt beriringkan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām*, suri tauladannya ummat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap istiḳāmah kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang yang tercinta ayahanda Aswandi dan ibunda Asnita dan Adik adik tercinta Junisa Pefrianti dan Irfan Ramdhan Serta Keluarag Besar dan yang mendoakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitan Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultan Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Afrizal,S.Sos,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Mahendra Andriawan S
Nim. 01870614285



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	8
1.5 Metode Penulisan	9
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	11
BAB II.....	13
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	13
2.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	13
2.2 VISI dan MISI Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ...	15
2.3 Stuktur Organisasi kantor Samsat Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi...	16
2.4 Uraian Tugas	17
2.5 Lokasi Geografis Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	20
BAB III.....	21
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	21
3.1 Tinjauan Teori	21
3.1.1 Defenisi Pajak	21
3.1.2 Fungsi Pajak	22
3.1.3 Defenisi Pajak Daerah	24
3.1.4 Jenis Jenis Pajak Daerah.....	25
3.1.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30
3.1.6 Defenisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	30
3.1.7 Pengertian Penghapusan Sanksi Pajak	31



3.1.8	Aturan – Aturan Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor ...	31
3.1.9	Ketentuan Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	32
3.1.10	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
3.1.11	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	35
3.1.12	Pajak Dalam Islam	36
3.2	Tinjauan Praktek.....	38
3.2.1	Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	38
3.2.2	Realisasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) yang Dihapuskan pada Masa-Masa Pemutihan 3 Tahun Terakhir.....	45
3.2.3	Ketentuan Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	49
3.2.4	Faktor Penghambat Dalam Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
3.2.5	Sanksi-Sanksi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Tidak Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.....	52
3.2.6	Kebijakan-Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	53
BAB IV	55
PENUTUP	55
4.1	Kesimpulan.....	55
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 3.2.1	43
Tabel 3.2.2	47



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar pembangunan di daerah berjalan dengan lancar, maka setiap pemerintah daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Dilihat dari perkembangan teknologi yang meningkat, dimana kebutuhan masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, kendaraan bermotor merupakan pilihan masyarakat saat ini sebagai sarana transportasi. Pemerintah menilai bahwa potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen-komponen penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan adalah pajak daerah.

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah tersebut.

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi setiap negara untuk membiayai kegiatan pemerintah membiayai pengeluaran yang harus dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional secara merata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara yang dewasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia tidak luput pada pembangunan di masing-masing daerah. Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), besarnya jumlah pajak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhutang ditetapkan oleh fiskus sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor sedangkan wajib pajak mempunyai tanggung jawab menyetor besarnya jumlah pajak yang terhutang tersebut. Sistem inilah yang disebut official assessment. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari official assessment System menjadi self assessment System. Selfassessment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diteruskannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tentulah mempunyai kendala tertentu seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terdundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak. Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Disamping piutang pajak yang berhasil ditagih atau dicairkan melalui tindakan penagihan, adapula piutang pajak yang bahkan sampai batas akhir penagihan tidak dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak yang tidak efektif untuk ditagih disamping akibat terjadinya kadaluarsa ketetapan penagihan itu maka fiskus mengusulkan agar piutang pajak tersebut dapat dihapuskan.

Tata cara penghapusan denda piutang pajak daerah yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Penghapusan denda piutang pajak dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur) berdasarkan permohonan penghapusan denda piutang pajak. Provinsi Riau juga memberlakukan penghapusan mengenai denda pajak. Gubernur Riau juga menghimbau kepada masyarakat agar bias memanfaatkan momen penghapusan denda pajak ini sebaik mungkin. Gubernur Riau juga menyampaikan agar masyarakat memanfaatkan kegiatan penghapusan pajak ini. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup membayarkan pajak pokoknya saja.

Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar pajak kendaraan motor dan menganggap sepele tentang pembayaran pajak, mereka beranggapan motor yang mereka miliki tidak juga untuk bepergian jauh hanya di gunakan di desa untuk bekerja. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau, yang mana melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kegiatan penghapusan pajak kendaraan atau pemutihan. Kepala SAMSAT Teluk Kuantan yakni Azmir Aziz mengatakan bahwa, masyarakat sudah bisa menikmati program penghapusan denda pajak. Adapun syarat untuk bisa menerima insentif penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan ini sama dengan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor biasa. Dengan begitu, diharapkan agar masyarakat yang agar dapat melakukan pendaftaran pemutihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Masa Keringanan

No.	Tahun	PKB	BBN-KB
1	2019	1.198.460.165	18.591.580
2	2020	1.544.156.537	281.380.500
3	2021	641.824.597	91.000

Sumber: : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas menggunakan kendaraan untuk kegiatan sehari-hari. Namun masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan kondisi pajak kendaraan yang telah mati. Masyarakat terkesan tidak mempermasalahkan kendaraan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Kuantan Singingi untuk taat pajak. Dan juga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program serta tata cara penghapusan pajak ini karena kurangnya informasi dari pihak SAMSAT.

Hal ini menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian dengan memilih judul **“Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan mendapatkan gelar ahli madya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
2. Mengetahui Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap (SAMSAT) Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengetahui Hambatan Dalam Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap (SAMSAT) Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi

Penulis melakukan penelitian di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini :

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui samsat kuantan singingi.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

b. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan studi literature yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpul tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan dengan tujuan agar tugas akhir ini mudah di pahami sehingga mencapai sasarannya. Dalam penulis dan tugas akhir ini bahasan yang akan di uraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan metode penulisan dan sistematika penulisan dari penelitian penulis

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berisi tentang sejarah Kantor SAMSAT, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Sejarah Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerja sama antar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan provinsi dan PT Jasa Raharja (persero). Latar belakang terbentuknya samsat seluruh Indonesia diawali dengan keluarnya surat keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertanahan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL, KEP/13/XXI/76 Nomor, KEP-169/MK/IV/12?1976;311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintahan daerah tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak - pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini didirikan dan dibentuk karena dahulunya masyarakat kesulitan dalam melakukan pelayanan dalam membayar pajak, sehingga didirikan dan dibentuklah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. Karena di kantor samsat sudah terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pelayanan pembayaran pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Pembentukan Samsat di seluruh Indonesia adalah interaksi bersama Menteri Pertanahan Keamanan, Menteri Dalam Negri, dan Menteri Keuangan Nomor 6/MK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam penerbitan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tata Cara Kendaraan bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Kantor Samsat Taluk Kuantan sebetulnya di sebut dengan Kanto (UPT) Unit Pelaksanaan teknik, tetapi karena di dalam satu gedung terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pemberi pelayanan dalam pembayaran dan pemungutan pajak maka disebut dan di bentuklah kantor SAMSAT, dan jumlah pegawai di kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ada sebanyak 17 orang pegawai dari dinas pendapatan termasuk UPT, 3 orang pegawai dari kepolisian dan 1 orang pegawai dari Jasa Raharja. Jadi jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 21 orang pegawai.

Tujuan di bentuk SAMSAT di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, prmbayaran pajak, dan SKDKLJ, Maka di bentuklah Kantor SAMSAT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau dibentuk pada 06 januari 2003, kantor ini masih sebagai pos pelayanan dan menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Firman HK. Pada Tahun 2004 sampai tahun 2006 kantor ini menjadi unit pelayanan (UP) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah bapak H.Maerhilis. Pada tahun 2006 sampai tahun 2009 kantor diganti menjadi Unit pelayanan Teknik Daerah (UPTD) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah bapak H. marlimas. Pada tahun 2009 awal sampai akhir tahun 2009 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah bapak Hendrizal MM. pada awal tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2010 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah bapak Ahmad Fauzi M,Si. Pada pertengahan tahun 2011 sampai tahun 2015 yang menjadi kepala kantor pada tahun 2016 sampai saat ini yang menjadi kepala kantor adalah Bapak Drs,R Muttaqin.

2.2 VISI dan MISI Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

2.2.1 VISI

“Menjadikan model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayai dan dibanggakan masyarakat”

2.2.2 MISI

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.

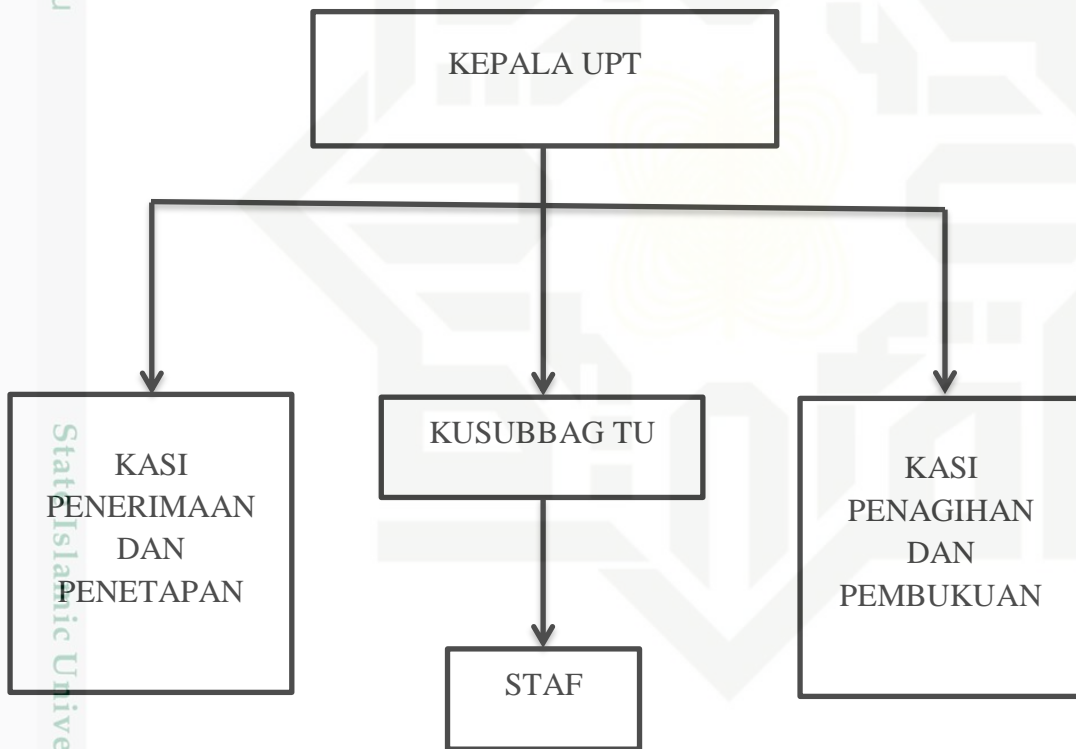
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara professional.
3. Memperoleh dana pembangunan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2.3 Stuktur Organisasi kantor Samsat Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi kantor Samsat Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai unit kerja masing-masing yaitu :

2.4.1 Kepala UPT

Memimpin pekerjaan keseluruhan segala bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

Adapun tugas dari kepala UPT adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan pendapatan daerah di bidang pekerjaan umum.

2.4.2 Kusubbag TU

Adapun dari Kusubbag TU adalah :

- 1 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seb bagian Tata Usaha.
- 2 Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbag Tata usaha.
- 3 Melaksanakan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur.
- 4 Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- 5 Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standart kompetensi, dan evaluasi jabatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 Melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumentasi,
- 7 Melaksanakan pengelolaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.
- 8 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Tata Usaha.
- 9 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4.3 Kasi Penerimaan dan Pendapatan

Adapun Tugas Kasi Penerimaan dan pendapatan

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.
2. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
3. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
5. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Kasi Penagihan dan Pembukuan

Adapun tugas dari kasi Penagihan dan pembukuan adalah:

1. Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan.
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
3. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan memelihara pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
7. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan ke pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4.5 Staf

Adapun Tugas Staf adalah:

1. Melayani dan mengarahkan mengenai jalur unit pelaksanaan teknis.
2. Membuka registrasi pajak dan mengawasi pemakaian formulir harian.
3. Menerima pembayaran pajak dan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Lokasi Geografis Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten kuantan Singingi berada ditengah kota teluk kuantan yang beralamat di Jalan Proklamasi No- Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan Singingi.

Kantor SAMSAT ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai wajib pajak serta memberi kepuasan, kenyamanan, dalam membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan program penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang mendapatkan penghapusan denda piutang pajak di tahun 2019 sebesar 7.907 Unit. Tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor yang mendapatkan penghapusan denda piutang pajak yaitu 6.548 Unit. Lalu di tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor yang mendapatkan penghapusan denda piutang pajak yaitu 2.689 Unit. Jadi dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 program pemutihan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan.
- 2) Adapun faktor penghambat dalam penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi yakni diantaranya:
 - Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Mengenai Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat
- Usia Kendaraan Bermotor
- Jarak yang Harus di Tempuh untuk Membayar Pajak

4.2 Saran

- 1) Untuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diharapkan agar memberikan informasi ataupun penjelasan kepada masyarakat mengenai hal-hal tentang pajak dan dalam hal ini yakni tentang penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor agar masyarakat memahami tentang maksud dan tujuan diadakannya program tersebut. Masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai yakni tentang penghapusan denda piutang pajak.
- 2) Untuk Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat memberikan kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, terlebih dalam keadaan pandemic seperti ini.
- 3) Untuk wajib pajak diharapkan dapat proaktif dan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Wajib pajak hendaknya meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara bertanya dengan call senter, inovasi informasi dalam website dan sosialisasi untuk menambah pengetahuan tentang pajak terkhusus dalam hal ini yakni tentang penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267

Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016)

Mardiasmo, buku Perpajakan edisi Terbaru 2018 (2018:3).Yogyakarta

Marihot Pahala Siahhan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi (2016:180)

Peraturan Perundang-undangan : Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

Satuan Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor

Siti Kurnia Rahayu (2013:46).perpajakan Indonesia.Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.VII/PP.00.9/5388/2021	Pekanbaru, 08 Oktober 2021 M
Sifat	: Biasa	1 Rabiul Awwal 1443 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Mahendra Andriawan S
 NIM. : 01870614285
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Di Kabupaten Kuantan Singingi"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5422/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 11 Oktober 2021 M
 4 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : MAHENDRA ANDRIAWAN S
 NIM : 01870614285
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an.Dekan,
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
TALUK KUANTAN

Jl. Proklamasi Telp. (0760) 20455 Teluk Kuantan
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/BAPENDA/UPT.07/209

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Provinsi Riau, menerangkan bahwa :

Nama : Mahendra Andriawan
 Universitas/Jurusan : UIN Sultan Syarif Kasim / D III Perpajakan
 Judul Penelitian : Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di Kuansing

Benar telah melaksanakan Riset di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dan selama berada di bawah instruksi dan bimbingan kami yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan riset dengan baik

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 27 Oktober 2021

An. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
 TALUK KUANTAN
 KASUBBAG TATA USAHA



[Handwritten Signature]

FENTA RUSGIAN, SP
 NIP. 19750502 200012 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis Bernama Mahendra Andriawan S, Lahir di Tembilahan pada tanggal 12 Oktober 2000, Merupakan Putra dari Ayah yang bernama Aswandi dan Ibu bernama Asnita. Penulis mengawali pendidikan di SDN 007 Kampung Baru Kecamatan Cerenti pada tahun 2006 – 2012, Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMPN 1 Cerenti pada tahun 2012 – 2015, Kemudian Penulis melanjutkan sekolah di SMAN 1 Cerenti pada tahun 2015 – 2018. Dan tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Diploma DIII Administrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bangkinang Kabupaten Kampar selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DIKABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.